

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Trade Off Theory*

Trade off theory merupakan pengembangan dari Modigliani dan Miller pada tahun 1958, yang menjelaskan bahwa “*trade off theory* adalah teori struktur modal yang menjelaskan bahwa perusahaan mempertimbangkan manfaat pajak (*tax shield*) dari bunga utang yang dapat mengurangi laba kena pajak. Namun, di sisi lain, penggunaan utang yang lebih besar juga membawa konsekuensi berupa biaya keuangan, seperti meningkatnya risiko kebangkrutan” (Modigliani & Miller, 1958). “*Trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam proporsi yang optimal dengan memaksimalkan manfaat yang di dapatkan dari utang untuk mengurangi pembayaran pajak dan meminimalkan biaya kebangkrutan yang timbul dari utang” (Brigham & Houston, 2009). Menurut Sari & Setiawan (2021), “*trade off theory* lebih menggambarkan hubungan risiko bisnis terhadap kebijakan utang, teori menjelaskan bahwa halnya *trade off theory* memiliki pola keseimbangan antara keuntungan dana dari utang dengan tingkat bunga yang tinggi dan biaya kebangkrutan”. Dalam teori ini mengindikasikan bahwa selama belum mencapai tingkat utang maksimal, menggunakan utang sebagai sumber pendanaan akan lebih menguntungkan daripada melepaskan saham karena adanya keringanan pajak. Namun, setelah mencapai titik maksimal tersebut, pemanfaatan utang oleh perusahaan menjadi kurang menguntungkan karena keuntungan tambahan yang di peroleh dari penggunaan utang tidak sebanding dengan peningkatan risiko kebangkrutan dan biaya agensi.

“Terdapat ringkasan atas *teori trade off*, yaitu”:

1. “Bunga yang di bayarkan oleh perusahaan adalah biaya yang dapat di kurangkan sehingga membuat utang yang di bayarkan lebih rendah daripada saham biasa atau preferen. Sehingga semakin banyak penggunaan utang yang di lakukan perusahaan maka akan mengurangi pajak dan memungkinkan laba operasional perusahaan lebih banyak mengalir ke investor.”
2. “Perusahaan berusaha memiliki rasio utang dengan target utang kurang dari 100% untuk menghindari dampak buruk dari potensi kebangkrutan.”
3. “Penggunaan utang yang terlalu rendah memungkinkan potensi kebangkrutan sangat rendah sehingga tidak material. Biaya terkait kebangkrutan menjadi mengimbangi dengan manfaat pajak dari utang. Walaupun biaya terkait kebangkrutan mengurangi, tetapi tidak sepenuhnya mengimbangi manfaat pajak dari utang, sehingga harga saham perusahaan terus meningkat seiring dengan meningkatnya rasio utang.”

2.2 Kebijakan Utang

Menurut IAI (2024), “liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu”. *“Liabilities are financing obligation that require future payment of money, service, or other assets”* yang dapat di artikan bahwa liabilitas (utang) adalah kewajiban keuangan yang memerlukan pembayaran, jasa atau aset lainnya di masa depan. Menurut Weygandt et al., (2019), *“Liabilities are claims against assets that is, existing debts and obligations. Business of all sizes usually borrow money and purchase merchandise on credit”*. Yang artinya, “liabilitas adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Perusahaan dari berbagai ukuran biasanya meminjam uang dan membeli barang secara kredit”.

Menurut Weygandt et al., (2019), “liabilitas di bagi dalam dua kategori sebagai berikut”:

1. “*Non-current liabilities*”

“*Non-current liabilities* merupakan kewajiban yang di harapkan perusahaan untuk di bayar setelah satu tahun. Contoh dari *non-current liabilities* seperti *bonds payable, mortgages payable, long-term notes payable, lease liabilities* dan *pension liabilities*”.

2. “*Current liabilities*”

“*Current liabilities* merupakan kewajiban yang di harapkan di bayar oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau siklus operasi. Contoh dari *current liabilities* seperti *accounts payable, salaries and wages payable, notes payable, interest payable, dan income taxes payable*”.

“Perusahaan mencatat kewajiban dalam bentuk wesel sebagai utang wesel. Utang wesel sering di gunakan sebagai pengganti utang usaha atau utang dagang karena memberikan bukti formal kepada pemberi pinjaman tentang kewajibannya jika di perlukan upaya hukum untuk menagih utang tersebut. Perusahaan sering menerbitkan utang wesel untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Utang wesel biasanya mengharuskan peminjam untuk membayar bunga. Wesel di terbitkan untuk berbagai periode waktu. Utang wesel yang jatuh tempo untuk pembayaran dalam satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan di klasifikasikan sebagai kewajiban lancar” (Weygandt et al., 2019).

“Utang usaha atau utang dagang, adalah saldo utang kepada orang lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang di beli dengan akun terbuka. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Persyaratan penjualan (misalnya 2/10, n/30 artinya mendapatkan diskon sebesar 2% jika pembayaran di lakukan dalam 10 hari sejak tanggal faktur, jika melewati 10 hari harus membayar jumlah neto (penuh, tanpa diskon) dalam

waktu 30 hari sejak tanggal faktur atau 1/10, E.O.M (*End of Month*) artinya mendapatkan diskon 1% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah akhir bulan transaksi, jika lewat dari batas waktu maka pembayaran penuh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang di sepakai atau akhir bulan) biasanya menyatakan periode kredit, umumnya 30 hingga 60 hari” (Kieso et al., 2020).

Dalam IAI (2024), entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek, jika:

1. Entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut dengan untuk tujuan utama untuk di perdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk melunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Menurut IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) (2024), “terdapat beberapa dasar pengukuran liabilitas, yaitu”:

1. “Biaya historis (*historical cost*)”
“Liabilitas di catat sebesar jumlah yang di terima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (sebagai contoh, pajak penghasilan), pada jumlah kas atau setara kas yang di ekspektasikan akan di bayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal”.
2. “Biaya kini (*current cost*)”

“Liabilitas di catat sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak di diskontokan yang mungkin akan di perlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini”.

3. “Nilai terealisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)”

“Liabilitas di catat sebesar nilai penyelesaiannya; yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak di diskontokan yang diekspektasikan akan di bayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal”.

4. “Nilai kini (*present value*)”

“Liabilitas di catat sebesar arus kas keluar neto masa depan yang di diskontokan ke nilai sekarang yang di ekspektasikan akan di perlukan untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal”.

Dalam kebijakan utang terdapat keutungan dengan penggunaan utang dimana menurut Brigham & Houston (2009) kelebihan pendanaan menggunakan sumber dana eksternal utang adalah: (1) “bunga yang di bayarkan dapat di potong atau di bebaskan untuk mengurangi beban pajak”; (2) “pemilik utang atau *debt holder* memperoleh pengembalian dalam jumlah yang tetap, dan tidak perlu mengambil bagian laba perusahaan saat perusahaan dalam keadaan yang prima”.

Ada 3 implikasi penting mengapa perusahaan mendanai perusahaannya dengan utang (*financial leverage*), antara lain yaitu: (Brigham & Houston, 2009)

- (1) “Dengan memperoleh dana melalui utang, pemegang saham bisa mempertahankan kontrol terhadap perusahaan tersebut tanpa harus menambah investasi;”
- (2) “Kreditur mengharapkan ekuitas atau dana yang di setor oleh pemilik untuk memberikan marjin keamanan sehingga semakin tinggi proporsi total modal yang di sediakan oleh pemegang saham, semakin kecil risiko yang di tanggung kreditur;”

- (3) “Jika perusahaan menghasilkan dana lebih banyak pada investasi yang di danai dengan utang di banding jumlah yang harus di kembalikan maka tingkat laba yang di peroleh pemegang saham menjadi lebih besar meskipun tidak menambah penanaman modal”.

Berikut merupakan prinsip pemutusan kredit dari sisi perbankan, prinsip-prinsip pemutusan kredit yang harus di jalankan, yaitu: (OJK, 2020)

1. “*Four-Eye Principle*”

“*Four-Eye-Principle* merupakan sebuah prinsip dimana setiap keputusan kredit harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalkan biaya risiko kredit”.

2. “*One Obligor Principle*”

“Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib di konsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan. Penerapan *One Obligor Principle* pada dasarnya di landasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko satu debitur/ perusahaan di pengaruhi oleh risiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, risiko grup di pengaruhi oleh masing-masing perusahaan di dalamnya. Salah satu tujuan pelaksanaan *One Obligor Principle* adalah agar fasilitas kredit yang di berikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/ Legal Lending Limit dan untuk menetapkan strategi penanganan account yang akan di tetapkan kepada debitur dalam suatu grup debitur”.

3. “Prinsip Konsolidasi Ekposur”

“Merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang di peroleh debitur maupun grup debitur dengan menjumlahkan kredit yang dan akan di berikan bank kepada debitur maupun grup debitur tersebut. Artinya dalam melakukan analisa suatu proposal kredit, bank harus melihat jumlah keseluruhan fasilitas

kredit (*cash loan, non cash loan* dan fasilitas lainnya) yang di peroleh oleh satu debitur (grup atau non grup) dari bank tersebut dan bank lainnya”.

4. “Kepatuhan Terhadap Regulasi”

“Dalam pemberian kredit, pejabat/ pegawai kredit juga harus melaksanakan ketentuan/ aturanaturan perkreditan, baik ketentuan regulator eksternal maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen, dan dapat di pertanggungjawabkan”.

5. “Memenuhi Karakteristik Analisis Kredit”

“Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus di lakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk di berikan, di lakukan dengan analisis 5C dan 7P”.

Analisis kredit terdiri dari lima faktor yang membentuk penilaian yang disebut 5C yaitu:

1. *Character*

“*Character* merupakan sifat atau watak dari nasabah. Sifat atau watak dari nasabah yang akan di berikan kredit benar-benar harus di percaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepat janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat di lihat dari latar belakang nasabah”

2. *Capacity*

“*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan dari penjualan yang selalu meningkat di harapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila di

perkiraan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga di sebut dengan nama *Capability*”.

3. *Capital*

“*Capital* adalah kondisi kekayaan yang di miliki oleh perusahaan yang di kelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat di lihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang di sajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya”.

4. *Condition*

“Pembiayaan yang di berikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang di kaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang di biyai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil”.

5. *Collateral*

“*Collateral* merupakan jaminan yang di berikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang di tetapkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin”.

Penilaian suatu kredit dapat di lakukan dengan analisis 7P kredit, sebagai berikut:

1. *Personality*

“Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya”.

2. *Party*

“Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank”

3. *Purpose*

“Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, contohnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain”.

4. *Prospect*

“Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah”.

5. *Payment*

“Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh usaha lainnya”.

6. *Profitability*

“Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability di ukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya”

7. *Protection*

“Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang di berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang di berikan benar-benar aman. Perlindungan yang di berikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi”.

Terdapat beberapa pengukuran dalam menghitung kebijakan utang yaitu:

1. Rasio utang terhadap aktiva (*Debt to Asset Ratio/ DAR*) rasio utang terhadap aktiva di hitung dengan membagi total utang terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur jumlah aktiva yang di danai dengan utang.
2. Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio/ DER*)
Rasio utang terhadap ekuitas di hitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan modal sendiri dalam menjamin utang.
3. Rasio kelipatan pembayaran bunga (*Time Interest Earned Ratio*)
Rasio kelipatan pembayaran bunga di hitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini di gunakan untuk menunjukkan kemampuan laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar beban bunga.

Menurut Jombrik (2020), menyatakan bahwa “*trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan yang sebagian besar asetnya berasal dari aset tetap, maka akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan modal sendiri, karena aset tetap, seperti tanah dan bangunan, dapat di jadikan jaminan untuk menutupi utang-utangnya”. Hal ini sesuai dengan Brigham dan Houston (2011) dalam Jombrik (2020) yang menyatakan bahwa “secara umum perusahaan yang memiliki jaminan terhadap utang akan lebih mudah mendapatkan utang daripada perusahaan yang tidak memiliki jaminan”.

Menurut Abubakar et al., (2020), “utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang di gunakan oleh perusahaan untuk membiayai

kegiatan perusahaan”. Menurut Fardianti & Ardini (2021), “Kebijakan utang adalah salah satu bagian dari kebijakan pendanaan (*debt policy*). Kebijakan utang di perlukan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari utang”. Menurut Feryyanshah & Sunarto (2022), “kebijakan utang (*Debt Policy*) adalah keputusan pihak manajemen untuk memperoleh pendanaan, dengan maksud seluruh aktivitas operasional perusahaan dapat di penuhi”. Kebijakan utang pada penelitian ini menggunakan proksi *DAR (Debt to Asset Ratio)*. Menurut Weygandt et al., (2019) “*debt to asset ratio* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar total aset yang di danai oleh kreditur”.

Menurut Weygandt et al., (2019), “*Debt to Assets Ratio (DAR)* dapat di rumuskan sebagai berikut”:

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

DAR : *Debt to Asset Ratio*

Total Liabilities : Total seluruh utang yang di miliki perusahaan pada akhir tahun t

Total Assets : Total seluruh aset yang di miliki perusahaan pada akhir tahun t

“Aset adalah sumber daya ekonomik kini yang di kendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset di akui dalam laporan posisi keuangan kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat di ukur secara andal. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai dari peristiwa masa lalu. Liabilitas di akui dalam laporan posisi keuangan jika entitas memiliki kewajiban, kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya

ekonomik, dan kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masalah” (IAI, 2024).

Menurut Kieso et al., (2020), “terdapat klasifikasi aset sebagai berikut”:

1. “*Non-current assets* adalah aset yang tidak memenuhi definisi dalam aset lancar atau dapat di katakan sebagai aset yang di gunakan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun”. “*Non-current assets* mencakup berbagai item, yaitu”:

a. “*Long-Term Investments*”

“*Long-Term Investments* juga dapat di sebut sebagai investasi, terdapat empat jenis investasi jangka panjang, yaitu”:

1. “Investasi dalam surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang”.
2. “Investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak di gunakan dalam operasi, seperti tanah yang di miliki untuk spekulasi”.
3. “Investasi yang di sisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik”.
4. “Investasi pada anak perusahaan yang tidak di konsolidasi atau perusahaan asosiasi”.

b. “*Property, plant, and equipment (PPE)*”

“*Property, plant, and equipment (PPE)* adalah aset berwujud berumur panjang yang di gunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya terbuang (mineral)”.

c. “*Intangible assets*”

“*Intangible assets* atau aset tak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Mereka termasuk paten (*patent*), hak cipta (*copyrights*), waralaba (*franchise*), *goodwill*, merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*),

dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan (mengamortisasi) aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Secara berkala menilai aset tak berwujud (seperti *goodwill*) untuk penurunan nilai. Aset tak berwujud dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan, namun analisis keuangan sering mengabaikannya, karena penilaiannya sulit. Biaya penelitian dan pengembangan di bebaskan pada saat terjadinya kecuali untuk biaya pengembangan tertentu, yang di kapitalisasi jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan”.

d. “*Other assets*”

“Item yang termasuk dalam bagian *other assets* atau aset lain sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa *item* termasuk seperti biaya di bayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Perusahaan hanya memasukkan sisa *item*-nya pada bagian *other assets* selain *item* yang masuk pada *long-term investments*, *PPE*, dan *intangible assets*. *Item* lain yang mungkin di masukkan adalah aset dalam dana khusus, properti yang di miliki untuk di jual, dan kas atau sekuritas yang di batasi penggunaannya”.

2. “*Current assets* adalah kas atau uang tunai dan aset lain yang di harapkan perusahaan untuk di konversi menjadi kas, di jual, atau di konsumsi baik dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan saat menerima uang tunai untuk penjualan produk. Siklus beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam satu tahun, sebuah perusahaan menggunakan periode satu tahun. Jika siklus operasi lebih dari satu tahun, perusahaan menggunakan periode yang lebih lama”.

2.3 Likuiditas

Menurut Weygandt et al., (2019), “*liquidity ratios measure the short-term ability of the company to pay its maturing obligation and to meet unexpected needs for cash*”, yang artinya rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk mengembalikan atau membayar kewajibannya dan untuk memenuhi kebutuhan akan kas. Menurut Abubakar et al., (2020), “Likuiditas ialah suatu rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo tepat pada waktunya atau pada saat penagihan dengan menggunakan aktiva lancarnya. Pada umumnya aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sementara itu kewajiban lancar terdiri dari utang bank jangka pendek atau utang lainnya yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya atau melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat di katakan likuid”.

Menurut Kusumi & Eforis (2020), “likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban/utang jangka pendeknya”. Berdasarkan (Weygandt et al., 2019), terdapat beberapa rasio yang di gunakan untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan, yaitu:

1. “*Current ratio*”

“It is a widely used measure for evaluating a company’s liquidity and short-term debt-paying ability. The ratio is computed by dividing current assets by current liabilities”. *Current ratio* adalah ukuran yang banyak di gunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Rasio ini di hitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar.

2. “*Acid-test ratio*”

“Acid-test (quick) ratio is a measure of a company’s immediate shortterm liquidity. It is determined by dividing the sum of cash,

shortterm investments, and net accounts receivable by current liabilities". *Quick ratio* adalah ukuran likuiditas jangka pendek langsung perusahaan. Rasio ini di hitung dengan membagi jumlah kas, investasi jangka pendek, dan piutang bersih dengan kewajiban lancar.

3. "*Accounts receivable turnover*"

"It measures the number of times, on average, the company collects receivables during the period. It is determined by dividing net credit sales (net sales less cash sales) by the average net accounts receivable".

Rasio perputaran piutang usaha mengukur berapa kali, dalam rata-rata, perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Rasio ini di hitung dengan membagi penjualan kredit bersih (penjualan bersih di kurang penjualan tunai) dengan rata-rata piutang usaha bersih.

4. "*Inventory turnover*"

"It measures the number of times, on average, the inventory is sold during the period. Its purpose is to measure the liquidity of the inventory. It is determined by dividing cost of goods sold by the average inventory". Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali, dalam rata-rata, persediaan terjual selama periode tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Rasio ini di hitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata.

Dalam penelitian ini, likuiditas di proksikan dengan *Current Ratio*. "*Current ratio* merupakan rasio yang banyak di gunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Semakin tinggi *current ratio* artinya perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk meningkatkan kapasitas perusahaan memenuhi kewajibannya terkait kemampuan membayar utang jangka pendek" (Kusumi & Eforis, 2020). Menurut Kieso et al., (2020), *current ratio* di ukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current asset}}{\text{Current liabilities}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

CR : *Current Ratio*

Current Asset : Aset lancar perusahaan

Current Liabilities : Liabilitas lancar perusahaan

“Aset lancar adalah kas dan aset lain yang di harapkan perusahaan dapat di konversikan menjadi kas, di jual, atau di konsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi” (Weygandt et al., 2019). “Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:” (IAI, 2024)

- a. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- b. “Entitas memiliki aset untuk tujuan di perdagangkan;”
- c. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana di definisikan dalam PSAK 207; Laporan arus kas), kecuali aset tersebut di batasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Kieso et al., (2020), dalam *Current asset* termasuk: *inventory, prepaid expense, receivables, short-term investment, cash and cash equivalents*. Contoh akun lainnya yang terdapat pada *current asset* dalam perusahaan infrastruktur dengan subsektor transportasi (PT Garuda *Maintenance Facility Aero Asia Tbk* (GMFI)) yaitu aset kontrak yang merupakan biaya jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat, dan jasa *engineering* lainnya yang terjadi di tambah laba yang di akui atas jasa yang di berikan dan di kurangi jumlah yang telah di tagih. Berikut adalah penyajian aset lancar dalam posisi keuangan menurut IAI, 2024 dalam PSAK 201:

Gambar 2.1
Penyajian Aset dalam Laporan Keuangan

ASET	2024	2023
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Piutang usaha	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aset lancar lain	xxx	xxx
Total Aset Lancar	xxx	xxx
Aset Tidak Lancar		
Investasi pada instrumen ekuitas	xxx	xxx
Investasi dalam entitas asosiasi	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Aset takberwujud lain	xxx	xxx
Goodwill	xxx	xxx
Total Aset Tidak Lancar	xxx	xxx
Total Aset	xxx	xxx

Sumber: IAI, 2024

Menurut Weygandt et al., (2019), “*current liabilities* adalah utang yang di harapkan perusahaan untuk di bayar dalam satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama”. Dicatat sebagai *current liabilities* jika memenuhi salah satu dari dua kondisi:

1. “Kewajiban di perkirakan akan di selesaikan selama siklus operasi normal; atau
2. Kewajiban di perkirakan akan di selesaikan selama siklus operasi normal Kewajiban di perkirakan akan di selesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pencatatan”.

Current liabilities termasuk: *Account payable, Salaries and wages payable, Bank loans payable, Interest payable dan Taxes payable*. Contoh akun lainnya yang terdapat pada *current liabilities* dalam perusahaan infrastruktur dengan subsektor *heavy construction & civil engineering* (PT Adhi Karya Tbk) yaitu utang retensi merupakan jumlah uang yang di tahan oleh pemilik proyek dari

pembayaran yang jatuh tempo kepada kontraktor sampai proyek di selesaikan dan semua persyaratan kontrak terpenuhi dengan durasi dalam waktu satu tahun atau kurang setelah penyelesaian pekerjaan atau pemenuhan syarat-syarat tertentu telah di sepakati dalam kontrak. “Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain merupakan bagian modal kerja yang di gunakan dalam siklus operasi normal entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk di selesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama di terapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat di identifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas di asumsikan dua belas bulan” (IAI, 2024). Berikut adalah penyajian liabilitas jangka pendek dalam posisi keuangan menurut IAI, 2024 dalam PSAK 201:

Gambar 2.2
Penyajian Liabilitas dalam Laporan Keuangan

LIABILITAS	2024	2023
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan utang lain	xxx	xxx
Pinjaman jangka pendek	xxx	xxx
Bagian pinjaman jangka panjang	xxx	xxx
Utang pajak jangka pendek	xxx	xxx
Provisi jangka pendek	xxx	xxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxx	xxx
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman jangka panjang	xxx	xxx
Pajak tangguhan	xxx	xxx
Provisi jangka panjang	xxx	xxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxx	xxx
Total Liabilitas	xxx	xxx

Sumber: IAI, 2024

2.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Utang

Menurut Fardianti & Ardini (2021), “Likuiditas merupakan tingkat kemampuan suatu aktiva finansial yang berubah menjadi kas atau sebaliknya pada setiap saat yang di perlukan dengan kerugian yang paling minimum. Rasio likuiditas di proksi dengan rasio lancar (*current ratio*). Rasio tersebut dapat menunjukkan sejauh mana tagihan jangka pendek dari para kreditor dapat di penuhi. Perusahaan yang tidak likuid dapat memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan karena utang yang tidak bisa di bayar akan semakin menumpuk baik pinjaman pokok maupun bunganya”. Menurut Masril et al., (2021), “Rasio lancar (*current ratio*) ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya”.

Maka dari itu dalam penelitian ini di jelaskan bahwa semakin meningkatnya aset lancar maka akan mempengaruhi *Current Ratio (CR)* yang meningkat dan menunjukkan bahwa akan mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika presentasi likuiditas tinggi maka perusahaan di katakan efektif dan akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjadi sumber pembiayaan. Situasi ini memberikan jaminan keamanan bagi kreditor (bank) untuk meningkatkan jumlah pinjaman kepada perusahaan. Akibatnya, perusahaan di anggap memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah. Pinjaman yang di peroleh kemudian dapat di gunakan perusahaan untuk mendanai aset, sehingga nilai aset yang di danai oleh utang meningkat. Selain itu, kebijakan utang juga semakin berkembang karena kreditor terdorong untuk menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian (Kusumi & Eforis, 2020) dan (Fardianti & Ardini, 2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. Dalam *Trade-Off Theory*, likuiditas yang tinggi mengurangi risiko gagal bayar, sehingga perusahaan lebih mudah mengambil

utang. Tingginya likuiditas memberikan keyakinan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, memanfaatkan *tax shield* utang, dan mencapai struktur modal yang optimal tanpa meningkatkan risiko kebangkrutan. Berdasarkan teori yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian adalah:

Ha1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Utang.

2.5 Struktur Aset

“Aset merupakan sumber daya atau kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi seseorang maupun perusahaan akibat pembicaraan di masa sebelumnya” (Feryyanshah & Sunarto, 2022). Menurut Kusumi & Eforis (2020), “aset tetap adalah aset yang di miliki perusahaan yang bersifat permanen dan dapat habis dalam proses produksi yang memiliki jangka waktu perputaran lebih dari satu tahun”. Menurut Masril et al., (2021), “perusahaan yang memiliki struktur aset dengan porsi aset tetap yang tinggi lebih mudah dalam melakukan pinjaman terhadap pihak eksternal karena di nilai memiliki *securable asset* (asset jaminan) yang lebih baik. Semakin besar struktur aset yang di miliki oleh suatu perusahaan maka semakin aset perusahaan yang dapat di jaminkan, sehingga semakin besar utang yang dapat di peroleh”. Pada penelitian ini struktur aset di hitung dengan menggunakan Struktur Aset (*SAT*). Berikut adalah rumus untuk menghitung struktur aset yang dapat di rumuskan (Arfina et al, 2017) dalam (Kusumi & Eforis, 2020):

$$\text{Struktur Aset (SAT)} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

SAT : Struktur Aset

Aset Tetap : Jumlah aset tetap neto yang di miliki perusahaan

Total Aset : Total aset yang di miliki perusahaan

“Aset adalah sumber daya yang di kendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan di harapkan akan mengalir ke entitas” (Kieso et al., 2020). “Aset merupakan sumber daya yang di kendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan di harapkan akan di peroleh entitas. Aset di akui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat di pastikan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat di ukur dengan andal. Aset tidak di akui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya di pandang tidak mungkin mengalir ke entitas walaupun pengeluaran telah terjadi” (IAI, 2024). Menurut Kieso, et al. (2018), “aset merupakan salah satu dari tiga unsur dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pengukuran aset dalam neraca atau laporan posisi keuangan menggunakan beberapa dasar pengukuran tertentu yaitu”:

1. “Biaya Historis (*Historical Cost*)”

“Aset di catat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang di bayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang di berikan, untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan”.

2. “Biaya Kini (*Current Cost*)”

“Aset di nilai dalam jumlah kas atau setara kas yang yang harus di bayar bila aset yang sama atau setara kas tersebut di peroleh sekarang”.

3. “Nilai Realisasi/ Penyelesaian (*Realizable/ Settlement Value*)”

“Aset di nyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat di peroleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal”.

4. “Nilai Sekarang (*Present Value*)”

“Aset di nyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan, yang di diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang di harapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal”.

5. “Nilai Wajar (*Fair Value*)”

“Perkembangan standar akuntansi berbasis *International Financial Reporting Standards (IFRS)* telah memperkenalkan konsep nilai wajar.”

“Aset dapat di bagi menjadi 2 kelompok yaitu aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*). *Current assets* adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk di konversi menjadi kas, di jual, atau di gunakan baik dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih panjang. *Non-current assets* adalah aset yang tidak memenuhi definisi dari *current assets*” (Kieso et al., 2020). “*Noncurrent assets* sering di sebut juga sebagai *plant assets* atau *property, plant, and equipment*. *Plant assets* adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik yaitu memiliki substansi fisik (ukuran dan bentuk yang pasti), di gunakan untuk operasional bisnis, dan tidak di maksudkan untuk di jual ke konsumen. *Plant assets* biasa di sebut juga dengan *property, plant, and equipment; plant and equipment; and fixed assets*” (Weygandt et al., 2019). Menurut Kieso et al., (2020), “*current assets* terdiri dari”:

1. “*Inventories*”

“Untuk menyajikan persediaan dengan benar, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian yaitu nilai realisasi bersih atau biaya terendah”. “Persediaan adalah aset yang di kuasi untuk di jual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk di gunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa” (IAI, 2024) dalam PSAK 202.

2. “*Receivable*”

“Perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang di antisipasi akibat tidak tertagihnya piutang. Jumlah dan sifat kerugian non-perdagangan piutang, dan setiap piutang yang di jadikan jaminan”.

3. “*Prepaid Expenses*”

“Biaya yang sudah di bayar dan di catat sebagai aset sebelum perusahaan menggunakannya”.

4. “*Short-Term Investments*”

“Sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) harus di laporkan sebagai aset lancar dan semua perdagangan efek di laporkan pada nilai wajar”.

5. “*Cash*”

“Kas merupakan aset yang paling likuid dan di gunakan sebagai alat pertukaran”.

“Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposits*)” (IAI, 2024) dalam PSAK 207.

Sedangkan menurut Kieso et al., (2020), “*non-current assets* terdiri dari”;

1. “*Long-Term Investments*”

“Investasi jangka panjang terdiri dari”:

- a. “Investasi pada sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang”.
- b. “Investasi pada aset tetap berwujud yang saat ini tidak di gunakan dalam kegiatan operasional, seperti tanah untuk spekulasi”.
- c. “Investasi yang di sisihkan pada dana khusus, seperti dana pensiun atau dana ekspansi pabrik”.
- d. “Investasi pada anak perusahaan yang tidak di konsolidasi atau perusahaan asosiasi”.

2. “*Property, Plant, and Equipment*”

“Aset berwujud yang memiliki jangka waktu panjang yang di gunakan dalam kegiatan operasional perusahaan”. Menurut Weygandt et al., (2019) “aset tetap di bagi menjadi 4 yaitu”:

a. “*Land*”

“Perusahaan menggunakan land sebagai tempat untuk membangun pabrik atau gedung perkantoran”.

b. “*Land Improvements*”

“*Land improvements* adalah penambahan yang di buat untuk tanah yang biasa di gunakan untuk *driveways*, lahan parkir, pagar, taman, dan *underground sprinklers*”.

c. “*Buildings*”

“Bangunan merupakan fasilitas yang di gunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya seperti toko, kantor, pabrik, gudang, dan hangar pesawat”.

d. “*Equipment*”

“Peralatan termasuk aset yang di gunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya seperti mesin kasir toko, peralatan kantor, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat”.

3. “*Intangible Assets*”

“Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya takberwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran” (IAI, 2024) dalam PSAK 238.

“Aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan”. Menurut Weygandt et al., (2019), “aset tak berwujud terdiri dari”:

a. “*Patents*”

“Paten adalah hak eksklusif yang di keluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerima untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan suatu penemuan untuk selama beberapa tahun tertentu sejak tanggal pemberian”.

- b. “*Copyrights*”
“Pemerintah memberikan hak cipta yang memberi pemiliknya hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual karya seni atau karya yang di terbitkan”.
- c. “*Trademarks and Trade Names*”
“Merek dagang atau nama dagang adalah kata, frasa, jingle, atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu”.
- d. “*Franchises and Licenses*”
“*Franchise* adalah pengaturan kontrak antara *franchisor* dan *franchisee*. Pemilik waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk menjual produk tertentu, melakukan layanan tertentu, atau menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, biasanya dalam area geografis yang di tentukan. Sedangkan, *licenses* adalah hak operasi untuk menggunakan properti publik, yang diberikan kepada bisnis oleh lembaga pemerintah. *Franchises* dan *licenses* dapat di berikan untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu tidak terbatas, atau selamanya”.
- e. “*Goodwill*”
“Biasanya aset tidak berwujud terbesar yang muncul pada laporan posisi keuangan perusahaan adalah *goodwill*. *Goodwill* mewakili nilai dari semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terikat dengan aset spesifik lainnya”.
4. “*Other Assets*”
“Aset lainnya memiliki banyak macam seperti *long-term prepaid expense* dan *non-current receivables*. Aset lainnya yang termasuk seperti aset dana khusus, properti yang di miliki untuk di jual, dan kas atau sekuritas yang di batasi penggunaannya”.

Menurut Kieso et al., (2020) “Sewa adalah perjanjian kontraktual antara *lessor* dan *lessee*, yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan

properti tertentu yang di miliki oleh *lessor* untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, *lessee* melakukan pembayaran sewa selama jangka waktu sewa kepada *lessor*". Contoh aset yang di sewakan yaitu peralatan teknologi informasi, alat transportasi (seperti truk dan pesawat), alat konstruksi, dan peralatan pertanian.

1. Pencatatan oleh penyewa (*Lessee*):

- 1) Aset Hak Guna: Pada awal sewa, penyewa mencatat "aset hak guna" yang setara dengan nilai kini dari kewajiban sewa. Ini mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset selama periode sewa.
- 2) Kewajiban Sewa: Penyewa mencatat kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan. Nilai kini dari pembayaran sewa tersebut di hitung menggunakan tingkat bunga implisit atau tingkat pinjaman inkremental penyewa.
- 3) Beban Penyusutan: Aset hak-guna di susutkan selama jangka waktu sewa atau umur manfaat aset, mana yang lebih pendek.
- 4) Beban bunga: Penyewa mengakui beban bunga atas kewajiban sewa menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan oleh *lessee*:

- 1) Pada awal sewa *lessee* mencatat aset hak-guna dan kewajiban sewa

<i>Right-of-Use Asset</i>	<i>xxx</i>	
<i>Lease Liability</i>		<i>xxx</i>
<i>Lease Liability</i>	<i>xxx</i>	
<i>Cash</i>		<i>xxx</i>
- 2) Setiap periode, *lessee* mengakui beban bunga atas kewajiban sewa dan beban penyusutan untuk aset hak-guna

<i>Interest Expense</i>	<i>xxx</i>	
<i>Lease Liability</i>		<i>xxx</i>
<i>Depreciation Expense</i>	<i>xxx</i>	

Right-of-Use Asset **xxx**

- 3) Pembayaran sewa di catat sebagai pengurangan kewajiban dan pembayaran bunga, tergantung pada perhitungan amortisasi.
2. Pencatatan oleh Pemberi Sewa (*Lessor*)
- 1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*): Jika sewa memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan, pemberi sewa mencatat "*lease receivable*" dan menghapus aset yang di sewakan dari neracanya. Pendapatan bunga di akui berdasarkan metode suku bunga efektif.
- 2) Sewa Operasi (*Operating Lease*): Pemberi sewa mempertahankan aset di neraca, mencatat pendapatan sewa secara periodik (umumnya secara garis lurus), dan tetap menyusutkan aset sewa.

Pengakuan oleh *lessor*:

- 1) Untuk sewa pembiayaan, pemberi sewa mengakui pendapatan penjualan untuk bagian dari aset yang "terjual" kepada penyewa, serta piutang sewa untuk pembayaran sewa yang akan di terima.

Pada awal sewa (pengakuan penjualan dan piutang sewa):

<i>Lease Receivable</i>	xxx
<i>Cost of Goods Sold</i>	xxx
<i>Sales Revenue</i>	xxx
<i>Asset (inventory)</i>	xxx
<i>Unearned Interest Income</i>	xxx

Setiap menerima pembayaran sewa (pengakuan penerimaan kas dan pengurangan piutang):

<i>Cash</i>	xxx
<i>Lease Receivable</i>	xxx
<i>Interest Revenue</i>	xxx

- 2) Untuk sewa operasi, pemberi sewa mengakui pendapatan sewa secara periodik dan melanjutkan penyusutan aset yang di sewakan.

Pengakuan pendapatan sewa:

Cash	xxx
Lease Revenue	xxx

Pengakuan penyusutan aset:

Depreciation Expense	xxx
Accumulated Depreciation	xxx

Menurut Kieso et al., (2020) *revenue recognition* merupakan “pengakuan pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang di terima, atau di harapkan di terima oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Untuk mengakui pendapatan harus pada periode akuntansi ketika kewajiban pelaksanaannya terpenuhi”.

Terdapat 5 langkah untuk pengakuan pendapatan, yaitu:

1. “Identifikasi kontrak dengan *customers*”.
“Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang harus di laksanakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis yang lazim. Pendapatan hanya di akui jika terdapat kontrak yang sah”.
2. “Identifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) yang terpisah dalam kontrak”.
“Merupakan janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan, janji ini bisa dalam bentuk tersurat, tersirat, atau mungkin di dasarkan pada praktik bisnis yang lazim”.
3. “Menentukan harga transaksi”.
“Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang di harapkan di terima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang dan jasa”

4. “Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*)”

“Merupakan harga transaksi yang di alokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan yang di dasarkan pada nilai wajar”.

5. “Mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) terpenuhi”.

“Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya ketika barang dan jasa sudah beralih dan dalam pengendalian customers”.

1. Penjual sudah memiliki hak untuk menerima pembayaran,

2. Penjual telah mengalihkan hak kepemilikan secara hukum,

3. Penjual telah mengalihkan kepemilikan fisik,

4. Pembeli sudah menanggung resiko secara penuh atas barang yang di beli,

5. Pembeli sudah menerima barang.

1. Jurnal Pendapatan Penjualan

Merupakan pencatatan pendapatan yang di peroleh dari penjualan barang atau produk.

Cash/ Account Receivable xxx

Sales Revenue xxx

Jika barang terjual, perusahaan akan mencatat *COGS (Cost of Goods Sold)* dan mengurangi nilai persediaan.

Cost of Goods Sold xxx

Inventory xxx

2. Jurnal Pengakuan Pendapatan

Cash xxx

Accounts Receivable xxx

Khusus untuk perusahaan infrastruktur, pendapatan memakai *percentage of completion method*. Metode ini, di gunakan untuk pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang, terutama di bidang konstruksi. Metode ini memungkinkan

perusahaan untuk mengakui pendapatan dan laba kotor secara bertahap, seiring dengan kemajuan proyek menuju penyelesaian. Pengukuran kemajuan biasanya dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya yang telah terjadi hingga saat ini dengan estimasi total biaya untuk menyelesaikan kontrak tersebut (*cost-to-cost-basis*). Perhitungan dalam metode *percentage-of-completion* di dasarkan pada persentase kemajuan proyek (*cost-to-cost-basis*). Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan:

1. Mengitung *Percent Complete*

$$\frac{\text{Biaya yang Telah Terjadi}}{\text{Estimasi Total Biaya}} = \text{Persentase Penyelesaian}$$

2. Menghitung *Revenue (or Gross Profit)* yang Di akui

$$\begin{aligned} \text{Total Nilai Kontrak (atau laba kotor)} \times \text{Persentase Penyelesaian} \\ = \text{Pendapatan (atau laba kotor) yang Diakui} \end{aligned}$$

3. Menghitung *Revenue (or Gross Profit)* Periode berjalan

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan (atau laba kotor) yang diakui} - \text{Pendapatan (atau laba kotor) Kumulatif Periode Sebelumnya} \\ = \text{Pendapatan (atau laba kotor) Periode Berjalan} \end{aligned}$$

Berikut merupakan contoh jurnal (*cost-to-cost-basis*)

1. Untuk mencatat biaya konstruksi:

<i>Construction in Process</i>	xxx
<i>Materials, Cash, Payable</i>	xxx

2. Untuk mencatat tagihan kemajuan pekerjaan (*progress billings*):

<i>Accounts Receivable</i>	xxx
<i>Billings on Construction</i>	xxx

3. Untuk mencatat penerimaan kas dari tagihan:

<i>Cash</i>	xxx
<i>Account Receivable</i>	xxx

Berikut merupakan jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor serta mencatat penyelesaian kontrak.

1. Mengakui pendapatan dan laba kotor:

<i>Construction in Process (gross profit)</i>	xxx
<i>Construction Expenses</i>	xxx
<i>Revenue from Long-Term Contracts</i>	xxx

2. Mencatat penyelesaian kontrak:

<i>Billings on Construction in Process</i>	xxx
<i>Construction in Process</i>	xxx

Pengertian aset tetap menurut (IAI, 2024) dalam PSAK 216 adalah “aset berwujud yang di miliki untuk di gunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk di rentalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan di perkirakan untuk di gunakan selama lebih dari satu periode. Biaya perolehan aset tetap di akui sebagai aset jika dan hanya jika”:

1. “Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan”
2. “Biaya perolehannya dapat di ukur secara andal”.

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 216, “aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset di ukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi”:

1. “Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat di kreditkan setelah di kurangi diskon dan potongan lain”.
2. “Setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang di inginkan supaya aset tersebut siap di gunakan sesuai dengan intensi manajemen”.
3. “Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap di peroleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

“Setelah pengakuan aset, aset tetap di catat pada biaya perolehan di kurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat di ukur secara andal di catat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi di kurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi di lakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang di tentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang di revaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang di revaluasi berbeda secara material dengan dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan di syaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu di revaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu di lakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu di revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali. Jika suatu aset tetap di revaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama di revaluasi” (IAI, 2024).

2.6 Pengaruh Struktur Aset terhadap Kebijakan Utang

Menurut Kusumi & Eforis (2020), “perusahaan yang mempunyai aset tetap jangka panjang lebih besar, maka perusahaan tersebut akan banyak menggunakan utang jangka panjang, dengan harapan aset tersebut dapat di gunakan untuk menutup tagihannya. Dengan demikian semakin tinggi struktur aset perusahaan menunjukkan semakin tinggi kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin utang jangka panjang yang di pinjamnya. Sebaliknya semakin rendah struktur aset dari suatu perusahaan menunjukkan semakin rendah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin utang jangka panjangnya”. Menurut Masril et al., (2021), “perusahaan yang memiliki struktur aset dengan porsi aset tetap yang tinggi lebih mudah dalam melakukan pinjaman terhadap pihak eksternal

karena di nilai memiliki *securable asset* (aset jaminan) yang lebih baik. Semakin besar struktur aset yang di miliki oleh suatu perusahaan maka semakin aset perusahaan yang dapat di jaminkan, sehingga semakin besar besar utang yang dapat di peroleh”.

Maka dari itu dalam penelitian ini di jelaskan bahwa semakin besar struktur aset, maka akan semakin besar juga dalam aset tetap dan dapat di jadikan jaminan pinjaman untuk menggunakan aset. Salah satu langkah dalam meningkatkan aset tetap yaitu mengurangi pengeluaran untuk biaya biaya produksi contohnya seperti belanja bahan baku dan mendapatkan keuntungan lebih banyak di bandingkan beban yang akan di keluarkan sehingga akan menghasilkan *net income* yang artinya akan meningkatkan aset tetap dan akan di jadikan jaminan untuk berutang yang lebih tinggi karena kreditor akan memberikan pinjaman jika perusahaan memiliki jaminan.

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian dari Fauzi et al., (2022), menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. Dalam *Trade-Off Theory*, struktur aset yang tinggi (properti, pabrik, dan peralatan) memberikan jaminan bagi kreditor karena aset ini dapat digunakan sebagai agunan. Dengan agunan yang kuat, risiko kreditor menurun, sehingga perusahaan lebih mudah memperoleh utang. Selain itu, aset tetap yang besar menunjukkan stabilitas operasional, memungkinkan perusahaan memanfaatkan *tax shield* dari utang tanpa meningkatkan risiko kebangkrutan secara signifikan. Berdasarkan teori yang telah di uraikan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah:

Ha₂ : Struktur Aset berpengaruh positif terhadap Kebijakan Utang

2.7 Profitabilitas

Menurut Abubakar et al., (2020), “Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang di gunakan untuk menilai sejauh

mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat di terima. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”. Tetapi menurut Feryyanshah & Sunarto (2022), “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional. Perusahaan dengan tingkat profit tinggi akan cenderung lebih sedikit menggunakan utang, karena pendanaan perusahaan sudah terpenuhi dari laba di tahan, sehingga profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan utang perusahaan”.

Menurut Weygandt et al., (2019), “*profitability ratios measure the income or operating success of a company for a given period of time*” yang memiliki arti rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Menurut Weygandt et al., (2019), “terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas yaitu”:

1. “*Profit Margin*”

“*Profit margin* merupakan mengukur pendapatan penjualan perusahaan laba bersih untuk setiap unit mata uang. *Profit Margin* keuntungan di hitung dengan membagi keuntungan dengan omset”.

2. “*Asset Turnover*”

“*Asset Turnover* merupakan adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. *Asset Turnover* di hitung dengan membagi perputaran dengan saldo rata-rata”.

3. “*Return On Assets*”

“*Return On Assets (ROA)* merupakan rasio untuk mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset. *ROA* di hitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata aset”.

4. “*Return on Ordinary Shareholders' Equity*”

“*Return on ordinary shareholders’ equity* merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dari perspektif pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih yang di peroleh perusahaan untuk setiap jumlah uang yang di investasikan perusahaan. Rasio ini di hitung dengan membagi laba bersih di kurangi dividen yang di sukai dengan ekuitas rata-rata”.

5. “*Earnings Per Share*”

“*Earnings per share (EPS)* merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur laba bersih yang di peroleh pada setiap lembar saham. Rasio ini di hitung dengan membagi laba bersih setelah di viden preferen dengan *weighted average ordinary shares outstanding*”.

6. “*Price Earnings Ratio*”

“*Price Earnings Ratio* merupakan mencerminkan penilaian investor terhadap laba masa depan perusahaan. Rasio ini di peroleh dengan membagi harga pasar saham dengan laba per saham”.

7. “*Payout Ratio*”

“*Payout Ratio* merupakan rasio yang mengukur persentase pendapatan yang di bagi sebagai dividen tunai. Rasio ini di hitung dengan membagi dividen kas dengan laba bersih”.

Dalam penelitian ini, profitabilitas di ukur menggunakan proksi *ROA (Return On Assets)*. Menurut Weygandt et al., (2019). “*Return On Assets* dapat di rumuskan sebagai berikut”:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Assets} \quad (2.4)$$

Keterangan:

ROA : *Return On Assets*

Net Income : Laba tahun berjalan

Untuk menghitung rata-rata total aset (*average assets*), di gunakan rumus berikut (Weygandt et al., 2019):

$$Average Asset = \frac{Total Asset(t) + Total Asset (t - 1)}{2} \quad (2.5)$$

Keterangan:

Average Asset : Rata-rata aset perusahaan.

Total Asset_(t) : Jumlah aset perusahaan pada tahun t.

Total Asset_(t-1) : Jumlah aset perusahaan pada 1 tahun sebelum tahun t.

Menurut IAI (2024) dalam PSAK 201, *Net income* atau “laba tahun berjalan didapatkan dengan cara mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan pada tahun berjalan menghasilkan laba bruto. Selanjutnya laba bruto ditambah dengan penghasilan lain dan bagian laba entitas asosiasi dan dikurangi dengan biaya distribusi, biaya administrasi, beban lain-lain, dan biaya pendanaan yang menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu, laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian, laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan akan menghasilkan laba tahun berjalan”. Berikut merupakan bagan *income statement* menurut (Kieso et al., 2020):

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Gambar 2.3
Bagan *Income Statement*

Sales Revenue		xxx
Cost of goods sold		xxx
Gross Profit		xxx
Selling and administrative expense		xxx
		xxx
Othe income and expense		
Interest Revenue	xxx	
Loss/Gain on xxx	xxx	xxx
Income from operations		xxx
Interest expense		xxx
Income before income tax		xxx
Income tax		xxx
Income from continuing operations		xxx
Discontinued operations		
Income from operation of xxx	xxx	
Loss/Gain on xxx	xxx	xxx
Net Income		xxx
Per ordinary share		
Income from continuing operations		xxx
Discontinued operations		xxx
Net Income		xxx

Sumber: Kieso et al., 2020

Menurut Kieso et al., (2020), “Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasional suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut:”

1. “*Sales*”
“Perhitungan pendapatan bersih atas penjualan yang terdiri dari penjualan, diskon atas penjualan, retur penjualan”.
2. “*Cost of Goods Sold*”
“Harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan”.
3. “*Gross Profit*”
“Hasil dari pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan”.
4. “*Selling Expenses*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan penjualan”.
5. “*Administrative or General Expenses*”

“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan administrasi perusahaan”.

6. *“Other income and expense”*

“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Item tersebut dapat berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen dan pendapatan bunga juga dilaporkan dalam bagian *other income and expense*”.

7. *“Income from Operations”*

“Hasil dari pengurangan antara *gross profit* dengan *selling expense* dan *administrative* atau *general expense* serta ditambah atau dikurangi dengan *other income and expense* maka menjadi *income from operations*. *Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal”.

8. *“Financing Costs”*

“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan seperti beban bunga”.

9. *“Income Before Income Tax”*

“Merupakan total pendapatan sebelum pajak atau hasil dari pengurangan *income from operations* dengan *financing cost*”.

10. *“Income Tax”*

“Pajak yang dipungut atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

11. *“Income from Continuing Operations”*

“Merupakan hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, jika tidak memilikinya maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya akan dilaporkan sebagai laba bersih”.

12. *“Discontinued Operations”*

“Merupakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan yang dihentikan”.

13. “*Net Income*”

“Merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“Menampilkan alokasi dari laba bersih perusahaan untuk pemegang saham pengendali serta untuk kepentingan non pengendali yang muncul jika terdapat konsolidasi perusahaan”.

15. “*Earning per Share*”

“Merupakan laba per lembar saham yang dilaporkan”.

Weygandt et al., (2019) mengatakan: “*assets are the resources a business owns.*” Artinya “aset adalah sumber daya yang di miliki perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya dalam aktivitas tertentu seperti produksi dan penjualan”. Sedangkan menurut IAI (2024), “aset berisikan sumber daya yang di kendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang di harapkan mengalir ke entitas”. Lebih lanjut lagi IAI (2024) mengatakan, “aset di akui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat di pastikan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat di ukur dengan andal. Aset tidak di akui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomiknya di pandang tidak mungkin mengalir ke entitas walaupun pengeluaran telah terjadi” (IAI, 2024).

Menurut Weygandt et al., (2019) “rata-rata total aset dapat di hitung dengan menggunakan saldo awal dan saldo akhir total aset di bagi dua. Aset terbagi menjadi dua jenis aset yaitu aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*)”. Kieso et al., (2020), menyatakan, “aset lancar merupakan aset yang di harapkan perusahaan untuk dapat di konversi menjadi kas, di jual, atau di konsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Lima item utama yang di temukan dalam aset lancar adalah persediaan (*inventories*), beban di bayar di muka

(*prepaid expenses*), piutang (*receivables*), investasi jangka pendek (*short-term investment*), serta kas dan setara kas (*cash and cash equivalents*)”.

Kieso et al., (2020) menjelaskan, “aset tidak lancar merupakan kelompok aset yang tidak termasuk di dalam definisi aset lancar. Aset tidak lancar di bagi menjadi 4 kelompok yaitu:” “Investasi Jangka Panjang (*long-term investments*), Properti, Pabrik, dan Peralatan (*property plant and equipment*), Aset Tidak Berwujud (*intangible assets*), Aset lainnya (*other asset*)”

2.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Utang

Menurut Abubakar et al., (2020), “profitabilitas adalah suatu standar yang di gunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu untuk menghasilkan laba pada tingkat yang dapat di terima. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Maka bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”. Menurut Weygandt et al., (2019) *ROA* merupakan rasio untuk mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Return On Asset (ROA)* dalam mengukur profitabilitas. Menurut Denziana dan Yunggo (2017) dalam (Kusumi & Eforis, 2020), “*ROA* merupakan rasio yang di gunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang di miliki perusahaan”. “*ROA* dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan di lihat dari penggunaan keseluruhan aset yang di miliki oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *ROA* yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang di pergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *ROA* negatif menunjukkan total aset yang di pergunakan tidak memberikan keuntungan/kerugian” (Kusumi & Eforis, 2020).

Maka dari itu dalam penelitian ini di jelaskan bahwa semakin tinggi *Return on Assets (ROA)* menunjukkan bahwa perusahaan sudah optimal dalam menjalankan maupun mengoprasionalkan perusahaan dalam menggunakan aset untuk

menghasilkan laba. Semakin tinggi laba maka akan meningkatkan kapasitas dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban terkait dengan pembayaran utang, dampak yang di dapat dari kreditur akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dan pinjaman tersebut dapat di gunakan untuk mendanai aset sehingga kebijakan utang semakin meningkat.

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian dari Kusumi & Eforis (2020), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan utang. Dalam *Trade-Off Theory*, profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga mengurangi risiko gagal bayar utang. Dengan laba yang stabil, perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk mendapatkan *tax shield* dari bunga tanpa meningkatkan risiko kebangkrutan. Berdasarkan teori yang telah di uraikan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian adalah:

Ha₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Utang.

2.9 Pengaruh Likuiditas, Struktur Aset, dan Profitabilitas secara simultan terhadap Kebijakan Utang

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh (Fauzi et al., 2022), menyatakan bahwa *free cash flow*, struktur aset, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang. Hasil penelitian yang di lakukan Masril et al., (2021), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan, struktur aset, dan likuiditas secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang. Hasil penelitian yang di lakukan Kusumi dan Eforis (2020), menyatakan bahwa struktur aset, likuiditas, profitabilitas, kebijakan dividen, kepemilikan saham institusional dan risiko bisnis secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang. Hasil penelitian yang di lakukan Abubakar et al., (2020), menyatakan bahwa *tangibility*, profitabilitas, *growth*, risiko bisnis, likuiditas, ukuran perusahaan dan umur

perusahaan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang. Hasil penelitian yang di lakukan Fardianti dan Ardini (2021), menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, dan struktur aset secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang. Hasil penelitian yang di lakukan Ferryanshah dan Sunarto (2022), menyatakan bahwa likuiditas, struktur aset, profitabilitas, dan *free cash flow* secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kebijakan utang.

2.10 Model Penelitian

Model penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Model Penelitian

